

**PERAN POLITIK PEREMPUAN DALAM MENENTUKAN KEPEMIMPINAN  
POLITIK LOKAL  
(Studi Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat)**

*Celtis Lativolia Sangari*<sup>1</sup>  
*Agustinus Pati*<sup>2</sup>  
*Alfon Kimbal*<sup>3</sup>

**Abstrak**

Politik merupakan sebuah aspek utama yang memegang pengaruh dalam penyelenggaraan disegala bidang, baik itu pendidikan, ekonomi, keamanan dan lain-lain. Disamping hal tersebut politik mengacu pada hubungan kekuasaan yang lebih luas, tidak hanya pada tataran elit politik, tetapi pada masyarakat umum dengan berbagai kategori yang terimplikasi didalamnya misalnya gender, kelas, golongan, usia, etnisitas dan sebagainya. Kemajuan jaman telah banyak mengubah pandangan tentang perempuan, mulai dari pandangan yang menyebutkan bahwa perempuan hanya berhak mengurus rumah dan selalu berada di rumah, sedangkan laki-laki adalah makhluk yang harus berada di luar rumah, kemudian dengan adanya perkembangan jaman dan emansipasi menyebabkan perempuan memperoleh hak yang sama dengan laki-laki. Perempuan sudah aktif berperan di berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Perempuan Dalam Menentukan Kepemimpinan Politik Lokal dengan menggunakan metode Penelitian kualitatif informan yang dipilih adalah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong, Ketua Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Ketua Tim Relawan Perempuan, Ketua Komisi Pemilihan Umum(KPU), Tokoh Masyarakat Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Perempuan Dalam Menentukan Kepemimpinan Politik Lokal sudah terlaksana dengan baik. Dapat dilihat dari unsur tim relawan berhasil memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten sorong provinsi Papua barat.

**Kata kunci: Peran Perempuan, Kepemimpinan Politik.**

<sup>1</sup>*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*

<sup>2</sup>*Ketua Penguji/Pembimbing Skripsi.*

<sup>3</sup>*Sekretaris Penguji/Pembimbing Skripsi*

## **Pendahuluan**

Gender menjadi aspek dominan dalam hubungan kekuasaan tersebut. Dalam relasi kelas, golongan usia maupun etnisitas, gender juga terlibat didalamnya. Hubungan gender dengan politik dapat ditemukan mulai dari lingkungan keluarga antara suami dan istri sampai pada tataran kemasyarakatan yang lebih luas, misalnya dalam politik praktis. Diera kontemporer saat ini peran perempuan dalam arena sosial dan politik. Tampilnya perempuan di panggung politik semakin meningkat. Demokrasi mengamanatkan adanya persamaan akses dan peran antara laki-laki maupun perempuan, atas dasar prinsip persamaan derajat, dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan.

Kemajuan jaman telah banyak mengubah pandangan tentang perempuan, mulai dari pandangan yang menyebutkan bahwa perempuan hanya berhak mengurus rumah dan selalu berada di rumah, sedangkan laki-laki adalah makhluk yang harus berada di luar rumah, kemudian dengan adanya perkembangan jaman dan emansipasi menyebabkan perempuan memperoleh hak yang sama dengan laki-laki. Perempuan sudah aktif berperan di berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Bahkan, pekerjaan-pekerjaan tertentu, yang sepuluh atau dua puluh tahun lalu hanya pantas dilakukan laki-laki, saat ini pekerjaan tersebut sudah bisa dan biasa dilakukan perempuan, termasuk pada pekerjaan kasar sekalipun.

Diantara sektor-sektor publik yang telah dimasuki perempuan, sektor politik merupakan hal yang sangat menarik sekaligus sangat penting. Menarik karena secara historis memang sangat kecil keterlibatan

perempuan dalam politik praktis. Sangat penting karena sesungguhnya keterlibatan perempuan dalam sektor politik dapat berpengaruh sangat besar pada kebijakan yang diambil, khususnya dalam kaitannya dengan peran perempuan secara menyeluruh.

Peran perempuan dalam politik di Indonesia saat ini memang semakin kuat, hal itu terlihat makin banyaknya kepala daerah, anggota DPR, bahkan para menteri yang dijabat seorang wanita. Bukan hanya menjabat namun kekuatan mereka mampu merubah Indonesia dalam hal positif. Peran perempuan dalam dunia politik Indonesia memang akan menjadi sebuah warna tersendiri bahkan dengan segala sifat kewanitaannya hal itu akan semakin melengkapi perpolitikan Indonesia. Dunia politik dalam pemilu maupun pilkada tidak hanya menjadi dominan kaum laki-laki saja, kaum perempuan juga harus ikut ambil bagian dalam kancah politik, untuk mendorong kader-kader perempuan potensial menduduki posisi penting pengambilan keputusan seperti halnya pada pemilihan kepala daerah.

Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam pilkada langsung, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan.

Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, baik Gubernur dan wakil Gubernur maupun Bupati/Walikota dan wakil

Bupati/Walikota, secara langsung merupakan perwujudan pengembalian hak-hak dasar rakyat dalam memilih pemimpin daerah. Pilkada pada tahun 2017 ini digelar secara serentak diseluruh Indonesia. Aturan umum yang dipakai ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Perempuan memiliki peran dan posisi penting dalam pembangunan suatu negara, kaum perempuan sama halnya dengan laki-laki, memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Peran perempuan dalam politik dan pemerintahan sangat diperlukan dalam pembangunan guna mewujudkan kehidupan negara yang menjamin setiap warga negaranya aktif dalam pembangunan. Keterlibatan perempuan dalam dunia politik dapat juga menentukan kepemimpinan politik lokal. Hal tersebut terjadi pada penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Sorong, Dibuktikan dengan adanya pembentukan “Tim Relawan Perempuan” pada pemilihan Kepala Daerah. Pilkada adalah momentum untuk menentukan masa depan lebih baik.

Terjadinya Pemilihan Umum serentak pada 15 februari 2017 di beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kabupaten Sorong merupakan salah satu daerah di provinsi papua barat yang telah melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah. Pada Pemilihan Kepala Daerah tahun ini terdaftar dua kandidat yang bersaing di Kabupaten Sorong antara lain adalah Zeth Kadakolo dan Ibrahim Pokko yang mendapat nomor urut 1, sementara Johny Kamuru dan Suka Harjono sebagai kandidat yang mendapat nomor urut 2. Kedua kandidat ini bisa dikatakan sama-sama kuat dalam merebutkan kursi Kepala Daerah Bupati dan wakil Bupati, kedua pasangan saling memantapkan strategi

politiknya untuk memikat hati masyarakat Kabupaten Sorong, namun tidak bisa dipungkiri kemenangan mutlak ini dicapai kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua). Johny Kamuru, dan Suka Harjono. Dengan perolehan suara 29.920 suara dari total suara sah 47.385. Hal tersebut merupakan kerja keras dan kerja cerdas tim pemenang dan bukti ril dukungan masyarakat yang secara dominan menyukai pasangan nomor urut 2 (dua). Kemenangan yang di dapat kandidat ini tentu karena dukungan dari berbagai pihak, namun yang paling menarik dicermatidalam momentum tersebut adalah bagaimana peran ibu-ibu dan perempuan-perempuan yang dari berbagai macam profesi termasuk kedua istri dari kandidat membentuk “ Tim Relawan Perempuan “ untuk mendukung dan memenangkan kandidat Johny Kamuru dan Suka Harjono (JK-SUKA) sebagai Bupati dan Wakil Bupati.

Hal ini belum pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya pada pemilihan Kepala daerah, belum pernah ada yang namanya Tim Relawan Perempuan, baru kali ini pada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sorong yang membentuk Tim Relawan Perempuan kandidat JK-SUKA mengambil kesempatan tersebut untuk mengubah paradigma berpikir sebagian orang bahwa perempuan tidak terlalu strategis dijadikan tim pemenang karena perempuan biasanya sibuk mengurus rumah tangga, ini kebalikan dalam moment pemilihan serentak kali ini Tim relawan perempuan begitu dominan terhadap pemenangan pasangan nomor urut 2 (dua) hal tersebut patut diapresiasi. Tim Relawan Perempuan Johny Kamuru dan Suka Harjono yang disingkat JK-SUKA begitu antusias mendukung calon Bupati dan Wakil Bupati ini, karena

melihat dari visi-misi mereka yang sangat bermanfaat dan juga menilai bahwa Kabupaten Sorong ini membutuhkan orang-orang yang cerdas dalam mengatur pemerintahan pasangan nomor urut 2 (dua)lah yang mendapatkan kesempatan dan memiliki visi-misi yang jelas dan bisa membawa Kabupaten sorong kearah yang lebih baik lagi.

Perempuan membantu memenangkan kandidat JK-SUKA karena pada visi-misinya jelas banyak membantu perempuan dan masalah pendidikan gratis yang bisa membantu mengurangi biaya ekonomi keluarga yang taraf ekonominya lemah, juga ada program air bersih apalagi di Kabupaten Sorong sangat sulit air bersih. Jadi dengan adanya program JK-SUKA sangat membantu masyarakat terutama ibu-ibu yang banyak membutuhkan air dalam rumah tangga untuk memasak, mencuci, mandi dan lain-lain. Didalam visi-misinya juga mencantumkan bagaimana peran perempuan itu sangat penting, karena didalamnya menjelaskan adanya peningkatan peran perempuan dalam pelaksanaan pembagunan, dimana yang nantinya ibu-ibu atau perempuan-perempuan diberi kesempatan membantu meningkatkan kesejahteraan perekonomian. Ada beberapa hal yang diupayakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia perempuan sehingga dapat berperan secara aktif dalam pembangunan seperti pembangunan lokasi tempat penjualan hasil kebun, atau hasil kerajinan tangan. Hal inilah yang menggerakkan Tim Relawan Perempuan untuk membantu dengan sukarela memenangkan kandidat JK-SUKA.

Tim Relawan Perempuan JK-SUKA sangatlah berperan penting dalam memenangkan Pilkada ini,

karena tanpa mengenal lelah dan rasa takut mereka turun langsung mensosialisasikan visi-misi dari kandidat JK-SUKA kepada masyarakat terutama ibu-ibu dan perempuan-perempuan yang sudah umur memilih, di setiap kampung dan kelurahan yang ada didistrik-distrik sekabupaten sorong. Dalam setiap pertemuan yang dilakukan dengan ibu-ibu dan perempuan-perempuan mereka begitu antusias mendukung pasangan JK-SUKA menjadi Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sorong, bahkan mereka menyambut kedatangan Tim Relawan Perempuan dengan lagu yang dibuat oleh mereka, meskipun pertemuan yang dilakukan sudah pada malam hari tetapi mereka tetap semangat mendengarkan visi-misi yang disosialisasikan yang nantinya ketika menjadi Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan dijalankan sebagaimana mestinya untuk membuat Kabupaten Sorong menjadi kearah yang lebih baik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Politik Perempuan dalam menentukan kepemimpinan politik lokal pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran Politik Perempuan Dalam Menentukan Kepemimpinan Politik Lokal.

### **Tinjauan Pustaka**

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian

peran menurut Soekanto (2010:212), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh.

Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Konsep kepemimpinan politik merupakan pembahasan yang cakupannya cukup luas. Oleh sebab itu, tanpa bermaksud untuk mengurangi nilai dan muatan dari konsep ini, maka penulis menggunakan konsep dasar secara lebih spesifik berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Konsep kepemimpinan politik merupakan suatu hal yang pokok dalam sistem politik, kerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Kepemimpinan mempunyai sifat universal dan merupakan gejala kelompok atau sosial. Universal oleh karena selalu ditemukan dan diperlukan dalam kegiatan usaha bersama. Kualitas seorang pemimpin politik sangat menentukan keberhasilan lembaga atau organisasi, dapat mempengaruhi orang lain, dan menentukan jalan serta perilaku benar yang harus dikerjakan bersama-sama. Kepemimpinan politik memegang peranan yang sangat penting dalam usaha mencapai tujuan suatu organisasi sehingga sering dikatakan bahwa suksesnya atau gagalannya yang dialami sebagian besar pemimpin politik itu sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang dimilikinya. Hal ini menimbulkan beberapa pengertian yang terkandung dalam kepemimpinan politik, *Peter G. Northouse*, menyatakan bahwa: kepemimpinan politik itu menyangkut hal kepemimpinan politik sebagai sebuah proses, dalam kepemimpinan politik ada pengaruh, konteks kepemimpinan politik adalah kelompok, ada unsur pencapaian tujuan. Sederhanakan bahwa kepemimpinan politik adalah suatu proses dimana seseorang mempunyai pengaruh dalam satu kelompok (organisasi) untuk menggerakkan individu lain meraih tujuan bersama, dengan demikian bukan saja orang yang memiliki sifat utama kepemimpinan (potensial), tetapi juga mampu untuk mengaktualisasikannya.

Di Indonesia, gerakan perempuan Indonesia ibarat sebuah perjalanan, sudah menempuh jarak yang cukup jauh dan panjang. Mengalami masa pasang, dan terjebak dalam kesurutan. Tenggelam atau ditenggelamkan. Aktor-aktornya, pupus dan tumbuh lagi. Keberhasilan gerakan demokratis 1998 telah memberikan sumbangan yang luar biasa bagi meluasnya organisasi perempuan. Namun, tantangan baru mulai tumbuh, yaitu meluasnya organisasi namun tidak diikuti dengan meluasnya gerakan (politik) perempuan. Situasi ini berkonsekuensi pada lemahnya posisi politik perempuan di hadapan negara, sehingga sangat gampang dikooptasi oleh alat-alat politik (khususnya partai politik) lama yang tidak benar-benar memperjuangkan pembebasan perempuan. Hanya "menyajikan" perempuan di dalam struktur kepengurusannya sebagai sarana penambahan suara saja. Oleh sebab itulah, pembangunan dan perluasan gerakan perempuan menjadi faktor kunci dalam melakukan perubahan. Tidak ada perubahan bagi perempuan tanpa suatu gerakan. Menurut Margaret (Leo, 2007:228) dalam buku yang berjudul Perihal Ilmu Politik, Gender merupakan konstruksi sosial. Gender juga sering diartikan sebagai perbedaan-perbedaan sifat, peran, fungsi, tugas, status dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang dibentuk, dibuat, dan di konstruksikan oleh masyarakat yang tumbuh dan disepakati dalam masyarakat tersebut serta dapat berubah sesuai dengan perkembangan zamannya. Secara etimologis, gender berasal dari bahasa Latin (Italia), yaitu *genus*, yang berarti tipe atau jenis.

Feminisme atau yang sering disebut juga feminisme merupakan ideologi

pembebasan perempuan. Karena semua pendekatan yang melekat dalam feminisme adalah suatu episteme dan / atau keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelaminnya. Konsep feminisme muncul, sekitar tahun 1800-an, karena banyak orang yang melihat perempuan hanya sebagai subordinat dan perannya dianggap "tidak penting" kaum laki-laki. Politik Feminisme yang dimaksud dalam konteks global adalah memperjuangkan hal-hal tentang keperempuanan. Feminis mempunyai 3 (tiga) ciri dasar, yaitu: *menyadari*, dengan adanya rasa sadar kita bisa mengetahui bahwa sesungguhnya gerakan feminisme itu perlu di pelajari. Kalau kita sudah tahu feminisme itu perlu dipelajari, maka selanjutnya yaitu *mencaritahu*, dengan itu kita tidak hanya sebatas tahu saja tetapi mencaritahu apa itu feminisme, perkembangan dan sejarahnya. Setelah semua itu, hal yang terakhir adalah *melakukan gerakan*.

Dalam pemilihan kepala daerah terlebih dahulu dipahami adalah pengertian atau definisi dari pemilihan umum (Pemilu), karena Pilkada merupakan bagian dari pemilu yang secara umum memiliki pengertian yang sama atau hampir sama, namun hanya konteks wilayahnya yang berbeda. Bicara terkait Pemilu berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat, pemimpin Negara atau pemimpin pemerintahan. Seluruh rakyat mempunyai hak melakukan pemilihan dan sebagian rakyat untuk menjadi pemimpin mereka, ini semua merupakan proses pemilu. Jadi melalui pemilu rakyat memunculkan calon pemimpin pemerintahan. Di Indonesia pemilihan umum (pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara

langsung, umum, bebas, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini juga berlaku pada pemilihan kepala daerah. Pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan sarana demokrasi bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dalam menentukan wakil-wakilnya di daerah, pilkada juga merupakan sarana untuk itu serta berpartisipasi dalam kegiatan politik. Selain itu pemilihan umum kepala daerah secara langsung juga merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap kedaulatan rakyat, karena melalui pemilihan kepala daerah langsung ini menandakan terbukanya ruang yang cukup agar rakyat bebas memilih pemimpinnya.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Fokus dalam penelitian ini adalah Peran Politik Perempuan Dalam Menentukan Kepemimpinan Politik Lokal (Studi Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat) dengan menggunakan teori Peran (Soekanto, 2010:212 ) yang mencakup 3 (tiga) syarat antara lain :

1. Posisi dalam Masyarakat
2. Perilaku dalam Masyarakat
3. Jabatan dalam Masyarakat

Informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan/informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk menentukan informan yang ada, digunakan teknik snowball sampling yaitu memilih unit-unit yang mempunyai karakteristik langka dan unit-unit tambahan yang ditunjukkan oleh informan sebelumnya. Dari informan yang mengalami langsung situasi atau kejadian-kejadian kemungkinan besar diperoleh informasi berhubungan dengan peran politik perempuan dalam menentukan kepemimpinan politik lokal. Informan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong
2. Ketua Pemenangan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati
3. Ketua Tim Relawan Perempuan
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
5. Tokoh Masyarakat

### **Hasil Penelitian**

Peran identik dengan cara seseorang dalam merumuskan target capaian untuk tujuan tertentu salah satunya antara lain wujud komitmen dan keseriusan dalam merumuskan harapan dan kesempatan sehingga apa yang diinginkan bisa terlaksana dengan baik, bila dikaitkan dengan konsep Pilkada antara lain adalah peran suatu kelompok dalam memenangkan salah satu calon dalam proses demokrasi. Salah satu ketertarikan dalam momentum pelaksanaan pemilihan umum di kabupaten Sorong adalah berkaitan dengan keberadaan pasangan calon nomor urut 2 (dua) atas nama "Johny Kamuru dan Suka Harjono" (JK-SUKA) yang secara fungsional memiliki peran yang sangat signifikan di masyarakat secara umum hal ini menimbulkan simpatikan dari berbagai pihak salah satunya inisiatif dari

kalangan perempuan untuk membentuk Tim Relawan Perempuan dalam rangka memenangkan pemilihan kepala daerah. Keterlibatan perempuan dalam pemenangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong tahun 2017 dengan membentuk Tim Relawan Perempuan Johnny Kamuru dan Suka Harjono (JK-SUKA) sangatlah menarik untuk dicermati karena melihat dari tahun-tahun sebelumnya pada pemilihan kepala daerah belum pernah ada yang namanya Tim Relawan Perempuan baru kali ini pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sorong yang membentuk adanya Tim Relawan Perempuan. Dengan peran tim Relawan Perempuan dalam menentukan kepemimpinan politik lokal pula mempengaruhi perilaku dan sikap para calon dan Tim pemenang baik dalam bertutur maupun dalam bersikap, sebab masyarakat saat ini sudah mulai cerdas dan teliti, karena terkadang dari mulut pula bisa membuat ektabilitas para pasangan calon bisa menurun, bahkan sebaliknya perilaku yang baik pula dapat mempengaruhi konsituen untuk dapat memilih dan bersimpati terhadap para calon. Keberadaan Tim relawan Perempuan ini yang di dalam keanggotaannya dari berbagai profesi sangat bagus adanya karena dengan itu Tim Relawan Perempuan dapat mempengaruhi masyarakat dan orang-orang disekitar mereka.

Perilaku Pasangan calon dalam masyarakat pula menjadi hal yang strategis karena sangat mempengaruhi tingkat kemenangan pasangan calon, bahkan harus diakui keberadaan Tim Relawan Perempuan dalam mengkampanyekan selalu mengutamakan ektabilitas yang berkaitan dengan kapasitas, kualitas dan integritas para calon yang diusung dalam hal ini pasangan JK-SUKA. Integritas dan

komitmen JK-SUKA dalam membangun Kabupaten Sorong terlihat dalam visi dan misi, yang memprioritaskan hampir disemua dibidang, baik kemasahatan rakyat sampai pada prioritas infrastruktur hal ini membuktikan bahwa JK-SUKA patut di dukung. Selain itu pula mereka selalu Terlibat dalam pembangunan Kabupaten Sorong. Contohnya, calon bupati yang terlibat dalam pembangunan kabupaten sorong, mengatur segala anggaran keuangan kabupaten sorong dan calon wakil bupati yang saat ini masih menjabat seorang wakil bupati, Berbekal berpengalaman di bidang pemerintahan dan keuangan. Contohnya, calon bupati yang pernah menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Mendukung anggaran yang pro publik, konsentrasi pada pembangunan insfrastruktur, pengembangan SDM, pembangunan ekonomi kerakyatan, ketersediaan pangan dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Contohnya, memberikan anggaran untuk pembangunan jalan, sekolah, pasar dan lain-lain, dengan pengelolaan transparan. JK-SUKA pula Berjiwa social dan memiliki hubungan yang harmonis dengan paguyuban masyarakat. Terlibat aktif di bidang keagamaan. Contohnya, calon bupati menjadi Ketua Badan Kerjasama antar Jemaat, dan calon wakil bupati menjadi Ketua Badan kerjasama antar umat beragama dan sangat aktif. Memiliki pendidikan yang mumpuni, Berjiwa reformis, moderat dan penuh empati, Perpaduan yang harmonis, semangat muda yang mencintai olahraga, kebudayaan dan kesenian.

Jabatan dalam masyarakat juga mempengaruhi tatanan kehidupan berpolitik, salah satu keunikan dalam pesta demokrasi di Kabupaten Sorong adalah jabatan para Tim Relawan



Perempuan yang kalau dilihat hampir semua memiliki posisi tawar dimasyarakat misalnya mereka sudah lama terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Hal ini tentunya harus diapresiasi sebab perempuan dalam posisi politik terkadang tidak diperhitungkan sebab perempuan diidentik dengan kaum yang lemah, fakta tersebut berbanding terbalik peran perempuan dalam menentukan politik lokal begitu dominan di kabupaten sorong, selain itu pula bahwa para perempuan yang memiliki jabatan di masyarakat cukup meyakinkan masyarakat. Seperti halnya anggota Tim Relawan Perempuan yang mempunyai jabatan dalam organisasi atau mereka sebagai pimpinan organisasi.

Selain posisi dan kedudukan para Tim relawan perempuan pula harus diakui bahwa jabatan/ posisi calon JK-SUKA begiitu spektakuler dimana kedua-duanya memiliki nilai yang sudah tidak lagi diragukan di kabupaten Sorong misalnya kedua-duanya pernah menjabat sebagai pejabat publik, calon Bupati pernah menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan wakilnya pernah menjabat wakil bupati di periode lalu hal ini membuktikan bahwa jabatan politik dan pemerintahan sangat berpengaruh bagi para pemilih untuk menyatakan sikap mendukung secara sepenuhnya karena faktor kepercayaan. Jabatan merupakan amanat yang diberikan oleh rakyat untuk dipergunakan dalam rangka melayani kepentingan masyarakat, ketika dipergunakan untuk kepentingan masyarakat maka amanat tersebut bisa berubah menjadi berkat. Hal tersebut yang dirasahkan oleh Pasangan JK-SUKA, bahwa pengorbanan melayani masyarakat selama ini berbuah manis di buktikan dengan dapat dapat dirainya suara 33.773 kalau di buat persentase

sekitaran 60.69% lebih jumlah suara yang didapat. Ini menandakan bahwa kesolitan dan kerja sama tim membuahkan hasil yang maksimal.

Strategi lainnya antara lain jabatan yang cukup meyakinkan dari para Tim relawan dalam masyarakat menjadi salah satu ukuran kemenangan pasangan JK-SUKA, Kemajuan jaman telah banyak mengubah pandangan tentang wanita, mulai dari pandangan yang menyebutkan bahwa wanita hanya berhak mengurus rumah dan selalu berada di rumah, sedangkan laki - laki adalah mahluk yang harus berada di luar rumah, kemudian dengan adanya perkembangan jaman dan emansipasi menyebabkan wanita memperoleh hak yang sama dengan laki-laki. Tuntutan persamaan hak wanita dalam berbagai bidang kehidupan sudah merupakan agenda di zaman sekarang ini. Prestasi dan keterampilan yang ditunjukkan kaum wanita selama ini sudah memunculkan anggapan bahwa antara wanita dan laki-laki tidak banyak terdapat perbedaan. Prestasi dan keterampilannya tersebut dapat dilihat dari kepemimpinan dan peranan wanita dalam kehidupan politik di negara kita. Kekuatan berupa ketegaran, ketegasan, dan ketepatan dalam mengambil keputusan merupakan ciri yang dimiliki wanita sekaligus menjadi syarat bagi kepemimpinannya. Beban dan tanggung jawab seorang wanita pemimpin lebih besar dari tanggung jawab laki-laki, dimana wanita berperan ganda yang juga memiliki tanggung jawab baik sebagai ibu dalam rumah tangga maupun tanggung jawab kewanitaannya. Kesejajaran antara wanita dengan laki-laki merupakan suatu usaha yang tidak sia-sia apabila wanita berusaha sesuai dengan kemampuannya, untuk dapat bersaing dengan kaum laki-laki sesuai dengan sifat kewanitaannya. Seperti halnya

dengan Pembentukan Tim relawan Perempuan yang berperan aktif dalam memenangkan pemilihan kepala daerah kabupaten sorong.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian setelah menganalisa dan membahas data yang diperoleh dari penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, perjuangan dari Tim Relawan Perempuan pada pasangan JK\_SUKA sangat memberikan dampak yang signifikan dalam tahapan pilkada yang berlangsung di Kabupaten Sorong. Hal ini dilihat dari visi-misi dan program dari JK-SUKA yang sangat relevan dengan kondisi masyarakat di Kabupaten Sorong. Terlebih lagi figur dari pasangan JK-SIKA yang di jual oleh Tim Relawan Perempuan dan itu melekat dihati masyarakat, dapat dilihat dari perilaku dan kapasitas yang ditonjolkan oleh pasangan tersebut. Tim Relawan perempuan dan tim Sukses lainnya tersebut yang turun ke lapangan untuk dapat langsung berinteraksi dengan masyarakat

Posisi Tim Relawan Perempuan pada Calon Nomor urut 2 (dua) di kalangan masyarakat sangat berpengaruh dan menentukan keberpihakan masyarakat untuk mendukung kepada Pasangan JK-SUKA di kabupaten Sorong hal tersebut dibuktikan dengan diraihnya suara 60,69 % lebih dalam pemilihan serentak.

Jabatan Kedua pasangan JK-SUKA cukup strategis di pemerintahan dan di masyarakat hal ini pula yang mempengaruhi pemilih untuk mendukung mereka, selain itu Kerja sama Tim Pemenang Perempuan dalam melakukan kerja-kerja politik setiap hari saat-saat kampanye berlangsung cukup signifikan sehingga bisa memenangkan pertarungan politik tersebut.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian yang diperoleh, pada dasarnya peran perempuan dalam memenangkan JK-Suka sudah terlihat efektif. Namun bukan merupakan suatu kekeliruan apabila penulis ingin mengemukakan beberapa saran yang mudah - mudahan bermanfaat

1. Peranan perempuan dalam kehidupan politik di negara kita perlu terus diupayakan, dalam artian partisipasi wanita agar benar - benar keberadaannya dapat diperhitungkan. Kesejajaran antara wanita dengan laki - laki merupakan suatu usaha yang tidak sia - sia apabila wanita itu sendiri berusaha sesuai dengan kemampuannya, sehingga dengan kemampuan yang sama maka akan sanggup bersaing di kehidupan ini dengan kaum laki - laki sesuai dengan sifat kewanitaannya.
2. Dalam upaya peningkatan kaum perempuan harus mempersiapkan diri dengan terus- menerus meningkatkan kualitas individu dalam ilmu pengetahuan, kemampuan berorganisasi dan memimpin, sehingga memberi keyakinan kepada orang banyak bahwa yang bersangkutan memiliki kapasitas (kecakapan), dan kapabilitas (kemampuan) untuk berperan aktif dalam berbagai bidang kehidupan, baik social, ekonomi maupun politik.
3. Perlunya mengubah pandangan beberapa kaum perempuan yang masih terjebak dalam paradigma kuno dalam masyarakat, meningkatkan kepercayaan diri kaum perempuan serta perlunya pendidikan hak-hak serta kewajiban bagi para kaum perempuan hingga menciptakan sinergitas antara perempuan dan laki-laki khususnya dalam pemerintahan di negara

sehingga partisipasi perempuan dalam perjuangan politik dapat terwadahi dengan baik.

4. Bagi aktivis gender terutama kaum perempuan yang ingin masuk dalam kancan politik atau terlibat dalam dunia politik dan pemerintahan perlulah peningkatan perempuan untuk mendapatkan sebuah keseragaman dalam pergerakan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, M. A. 2016. *Wawasan Kepemimpinan Politik (Perbincangan di Ranah Kekuasaan)*, PT PENJURU ILMU SEJATI.
- Ahmadi, A. 1982. *Sosiologi Pendidikan: Membahas Gejala Pendidikan Dalam Konteks Struktur Sosial Masyarakat*, Jakarta: Bina Ilmu
- Amal, I. 2004. *Metodologi Ilmu Politik*. Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada.
- Agustino, L. 2007. *Perihal Ilmu Politik; Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Budiardjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi revisi)*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Efendi, O. U. 1992. *Kepemimpinan dan Komunikasi*. Bandung. Mandar Maju
- Gaffar, M. J. 2012. *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta. Konstitusi Press.
- Humm, Maggie. 2002. *Ensiklopedia Feminisme* (terjemahan Mundi Rahayu). Yogyakarta: Penerbit Fajar Pustaka Baru.
- Kencana, I. 2006. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung. Refika Aditama.
- Irianto, 2008. *Dinamika politik Lokal era otonomi daerah*. Michigan. Pustaka Pelajar.
- Thoha, M. 1997, *Pembinaan Organisasi (Proses Diagnosa dan Intervensi)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Rasyid, R. 2000. *Makna Pemerintahan, Tinjauan segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta. Sumber Wdya.
- Sitepu, A. P. 2012 *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sodikin. 2014. *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Sujarweni, Wiratna, V. 2014 *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PB Pustaka Baru Perss.
- Soekanto, S. 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Varma, 2007. *Teori Politik Modern*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Wiratna, S. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta. Pustaka baru press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.